

Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pembangunan Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

¹Triani, ²Salamatul Afiyah

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; trianitriani1999@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; salamatul.afiyah@uinsgd.ac.id

Abstract

Based on Law No. 6 of 2014 Village development is an effort to improve the quality of life and life for the maximum welfare of the village community. Community needs that are a priority of the village include the development and maintenance of infrastructure, the environment in order to create comfort and prosperity for the community. Village Development is carried out by the village government by involving the entire village community. This research is motivated by high APBDes realization data, but there are damaged village roads. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the APBDes in Sindanglaya Village development and its inhibiting factors. The theory used by Emitai Etzioni to measure the effectiveness of the APBDes in the development of the Sindanglaya Village based on the dimensions of adaptation, integration, motivation, and production. Researchers used a qualitative research method descriptive approach. Primary data sources used are the results of observations and interviews; Secondary data used are the Sindanglaya Village LPPD document and APBDes 2016-2018. Realization Report, the text of the Law. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is the Miles and Hubberman model with the stages of reduction, data display, and drawing conclusions. The results of this study indicate the effectiveness of the APBDes in the development of Sindanglaya Village, Cimenyan District, Bandung Regency, is said to be effective. Based on the dimensions of adaptation, integration, and motivation can be said to be effective, but the dimensions of production have not been effective; Inhibiting factors include environmental characteristics, human resources, and community participation.

Keywords: Local Government, Effectiveness, Public Finance, Budgeting System

Pendahuluan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang peraturan mengenai Desa. Bahwa desa didefinisikan sebagai kesatuan dari masyarakat hukum dengan sistem pemerintahan yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat sewilayahnya berdasarkan prakasa masyarakat yang emmpnyai hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Reoublik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan keuangan desa, dan juga pertanggungjawaban keuangan desa yang terdapat dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yaitu suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa, didalamnya terdapat rincian semua hal yang berkaitan dengan penerimaan desa dalam satu tahun anggaran atau disebut pendapatan yang sudah menjadi hak desa. Seluruh pengeluaran dan atau kewajiban desa yang harus dilakukan dalam satu tahun anggaran akan diterima kembali oleh desa, serta berbagai pembiayaan desa atau semua pendapatan yang perlu dibayar kembali atau dibelanjakan akan dipulihkan.

Desa memiliki empat kewenangan, diantaranya dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa merupakan salah satu prioritas desa, terutama di Desa Sindanglaya yang memiliki tujuan salah satunya untuk melakukan pemerataan pembangunan. Terciptanya kenyamanan dan kesejahteraan melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan merupakan kebutuhan prioritas masyarakat desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa yang harus ikut terlibat didalamnya. Penyelenggaraan pembangunan perdesaan meliputi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan lingkungan perdesaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pendidikan, sarana dan prasarana kebudayaan; usaha ekonomi dan pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan pendidikan, sarana dan prasarana ekonomi, perlindungan lingkungan. (Hanif, 2011).

Berdasarkan observasi awal pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) dan Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes Sindanglaya Kecamatan Cimendan Kabupaten Bandung tahun 2016-2018 yaitu terdapat penyerapan APBDes yang cukup tinggi namun masih terdapat pembangunan infrastruktur desa yang belum baik, disertai dengan ketidakstabilannya presentase penyerapan APBDes, kemudian terdapat jalan yang diperbaiki beberapa tahun yang lalu namun tidak bertahan lama, dalam kurun waktu kurang dari dua tahun jalan tersebut rusak kembali dan belum diperbaiki sampai sekarang. Berikut bukti berupa gambar infrastruktur yang belum baik, tabel berbandingan target dan realisasi APBDes, dan realisasi program pembangunan infrastruktur Desa Sindanglaya:

Gambar 1

Jl. Cibiru Hilir



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2020)

Gambar 2
Jl. Kp. Kiarapayung



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2020)

Jalan tersebut diperbaiki pada tahun 2016, namun dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, jalan tersebut rusak kembali, hal tersebut menunjukkan bahwa ketahanan jalan tersebut kurang baik. Berikut data yang mendukung pembangunan jalan tersebut:

Tabel 1
Realisasi Anggaran Perbaikan Jl. Cilaja Hilir dan Jl. Kp. Kiara Payung Tahun 2016

| Kegiatan | Volume | Anggaran |
|---|--------------------|-------------|
| Betonisasi JalanJln. Cilaja Hilir | 30m x 4m x 0.25m | 42.000.000 |
| HOT MIX JalanJln. Cilaja Hilir | 100m | 100.000.000 |
| Betonisasi Jalan Desa Jln. Kp. Kiara Payung | 150 m ³ | 196.386.100 |

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Sindanglaya 2016

Tabel 2
Laporan Pendapatan Desa Sindanglaya

| Tahun | Target | Realisasi | % |
|-------|-------------------|-------------------|-------|
| 2016 | Rp. 1.928.071.368 | Rp. 1.694.563.200 | 87,8% |
| 2017 | Rp. 2.024.507.900 | Rp. 2.006.192.900 | 99% |
| 2018 | Rp. 2.028.675.100 | Rp. 1.890.091.900 | 93% |

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Sindanglaya, 2019

Tabel 3
Laporan Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sindanglaya

| Tahun | Target | Realisasi | % |
|-------|-------------------|-------------------|-------|
| 2016 | Rp. 901.397.400 | Rp. 851.397.400 | 94,5% |
| 2017 | Rp. 1.236.478.400 | Rp. 1.236.478.400 | 100% |
| 2018 | Rp. 1.117.474.750 | Rp. 1.065.004.000 | 95% |

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Sindanglaya, 2019

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terdapat perubahan naik dan turun dalam persentase target dan realisasi anggaran pendapatan pada APBDes, pada tahun 2016 persentase realisasi hanya mencapai 87,8% kemudian ditahun berikutnya hampir sempurna yaitu 99% capaian realisasi anggarannya, namun tidak dapat dipertahankan ditahun 2018 mengalami penurunan mencapai 7% yaitu terrealisasi mencapai 93% hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakstabilan realisasi anggaran dalam tahun ke tahun.

Pada tabel 3 laporan belanja bidang pelaksanaan pembangunan menunjukkan persentase yang naik turun pula, realisasi belanja pada tahun 2016 mencapai 94,5%, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,5% yaitu mencapai angka yang sempurna dan terealisasi 100%, namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan realisasi target yaitu mencapai 95%.

Pada tahun 2018 program kerja pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDes ada ketidak sesuaian, dalam RKPDes termuat 25 program pembangunan, yang terealisasi sebanyak 20 program, namun ada 8 program diluar RKPDes yang dilaksanakan.

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan melalui fenomena yang dilihat dan data yang diperoleh dari laporan realisasi APBDes maka permasalahan yang nampak di Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Adaptasi sumber daya manusia di pemerintahan desa Sindanglaya yang belum maksimal dalam pengelolaan APBDes sehingga terdapat ketidakstabilan presentase realisasi pendapatan dan belanja desa, dan terlihat dari kesalahan yang peneliti temukan dalam menghitung presentase realisasi tersebut.
2. Kurangnya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat di desa Sindanglaya mengenai APBDes dan pembangunan desa sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaannya pembangunan desa, jalan yang tempuh dalam bidang pembangunan seharusnya selalu mengedepankan pembangunan yang partisipatif dalam arti pembangunan yang akan dilaksanakan Desa dari, oleh dan untuk masyarakat.
3. Hasil dalam pembangunan masih belum maksimal, pembangunan infrastruktur secara menyeluruh di wilayah Desa Sindanglaya merupakan salah satu dari tujuan yang ditetapkan desa Sindanglaya namun masih ditemukannya infrastruktur jalan desa yang rusak, hal tersebut menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat sekitar dalam mengakses jalan tersebut, dimana pengembangan infrastruktur pedesaan merupakan salah satu prioritas utama desa yang termuat dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) Sindanglaya dan memiliki anggaran yang cukup besar dalam APBDes.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan faktor yang menghambat APBDes dalam pembangunan di Desa Sindanglaya kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Peneliti menggunakan teori dari Emitai Etzioni (dalam Indrawijaya, 2009) sebagai parameter untuk mengukur efektivitas APBDes dalam pembangunan Desa Sindanglaya yakni berdasar pada adaptasi, menyangkut kemampuan suatu organisasi untuk bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi tersebut terdapat tolak ukur dalam adaptasi diantaranya ruang lingkup kegiatan organisasi, proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja, juga seberapa besar pengaruh organisasi bagi lingkungan; integrasi, merupakan hal menjadi tolak ukur terhadap kemampuan organisasi dalam mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan organisasi lainnya; motivasi anggota, adalah pengukuran tentang keterkaitan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasi lainnya serta kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi; produksi, yakni usaha pengukuran efektivitas organisasi dikaitkan dengan jumlah dan kualitas dari hasil organisasi serta intensitas kegiatan organisasi tersebut.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, karena disesuaikan berdasarkan permasalahan yang diambil dan penelitian yang dilakukan bersifat menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam, tidak bertujuan untuk mencari hubungan antar variable, mencari pengaruh variable terhadap variable yang lainnya, membandingkan atau mencari perbedaan antar sasaran penelitian dengan pendekatan kualitatif karena digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dinamis dan masih berkembang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif karena peneliti menggunakan jenis data kualitatif karena secara umum meneliti tentang aktivitas social, masyarakat dan fungsi organisasi, seperti yang banyak dibahas dalam penelitian ini yaitu program pemerintah, keterkaitan dengan masyarakat, serta fungsi pemerintah Desa Sindanglaya. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer yang akan diperoleh peneliti yaitu bersumber dari hasil observasi dan informan wawancara, dan data sekunder yang bersumber dari dokumen LPPD Desa Sindanglaya tahun 2016-2018, Laporan Realisasi APBDes 2016-2018, naskah Undang-Undang.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, dimana peneliti melakukan pengajuan pertanyaan terkait judul penelitian kepada informan penelitian untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu pengumpulan data dengan menyiapkan pertanyaan penelitian yang sudah disiapkan untuk semua responden dengan pertanyaan yang sama. Wawancara dilakukan secara langsung dengan bertemu narasumber di kantor desa Sindanglaya. Berikut adalah daftar informan wawancara:

Tabel 3
Informan Wawancara

| No | Informan | Jumlah |
|----|-----------------------------------|--------|
| 1 | Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum | 1 |
| 2 | Kepala Seksi Kesejahteraan | 1 |
| 3 | Staff Keuangan | 1 |
| 4 | Staff Bendahara | 1 |
| 5 | Ketua BPD | 1 |
| 6 | Ketua LPMD | 1 |

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti (2019)

Selain itu, peneliti menggunakan teknik studi dokumen, dimana peneliti memperoleh data yang dapat dilampirkan dan diteliti untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian yakni melalui dokumen yang berwujud gambar dan tulisan seperti dokumen LPPD Desa Sindanglaya 2016-2018, Data APBDes 2016-2018, Laporan Realisasi APBDes 2016-2018, naskah Undang-Undang, studi pustaka, buku, penelitian terdahulu, dan jurnal.

Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan model Miles and Hubberman, membuat rangkuman, memilah hal-hal pokok, fokus pada hal penting, mencari tema serta pola agar data yang telah direduksi bisa memberi gambaran secara jelas, juga memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mengumpulkan dan melakukan pencarian data-data selanjutnya jika diperlukan (Sugiyono, 2012); penyajian data, dilakukan dalam bentuk paparan singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan hal-hal lain yang sejenis, namun diantara beberapa bentuk tersebut yang paling sering digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif yaitu berupa teks naratif (Sugiyono, 2012); dan penarikan kesimpulan, setelah mereduksi dan menyajikan data yang telah diperoleh oleh peneliti, kemudian disimpulkan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah mengenai efektivitas APBDes dan hambatanannya dalam pembangunan Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Hasil dan Pembahasan

A. Adaptasi

Dimensi adaptasi dalam hal ini menyangkut kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, untuk itu terdapat beberapa tolak ukur dalam adaptasi yakni proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja, ruang lingkup kegiatan organisasi tersebut, dan seberapa jauh manfaat organisasi tersebut bagi lingkungannya.

Proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja di Desa Sindanglaya sudah sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No.67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri No.83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pembentukan tim penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa ketika ada kekosongan jabatan untuk melakukan rekrutmen. Penyebab kekosongan diantaranya dikarenakan ada perangkat desa yang meninggal dunia, usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, atau dinyatakan telah melakukan tindak pidana. Dalam penghentian dan pengisian perangkat Desa dikonsultasikan dengan camat. Dalam pengelolaan APBDes, pemerintah desa telah melakukan pelatihan terlebih dahulu. serta aparat

desa dapat menyesuaikan dengan aplikasi Siskeudes karena Kemendagri menyiapkan aplikasi tersebut sesuai kemampuan rata-rata SDM perangkat desa. Berikut jawaban informan wawancara:

“Aplikasi penggunaan APBDes pakai Siskeudes, pelatihannya sama Dinas PMD. Kemendagri menyiapkan aplikasinya itu sesuai kemampuan rata-rata SDM perangkat Desa. Ada pembinaan rutin juga dari Dinas PMD dan Kecamatan terkait pengelolaan APBDes.” (Wawancara dengan Bapak Achmad Kurnia Kepala Urusan Tata Usaha, di Kantor Desa Sindanglaya, 13 Maret 2020).

Ruang lingkup kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Desa pada bidang pembangunan khususnya infrastruktur merupakan hasil dari rembuk warga, dan musyawarah desa, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. berikut hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa:

“Kalo infrastruktur lebih dispesifikkan lagi mah jadi banyak, kaya sarana prasarana jalan lingkungan, buatan irigasi, infrastruktur pemerintah desa lah. Biasanya mah pembuatan hmm kantor desa lah termasuk juga infrastruktur, terus hmm peningkatan asset desa juga. Ya kalo pembangunan jalan desa masuknya ke infrastruktur desa gitu, eem desa juga yang bisa dibangun mah ya jalan di desa saja atau pun jalan lingkungan yang di urus yang diserahkan kepada masyarakat, itu juga desa bisa melaksanakan pembangunan.” (Wawancara dengan Bapak Achmad Kurnia Kepala Urusan Tata Usaha, di Kantor Desa Sindanglaya, 13 Maret 2020).

Bidang pelaksanaan pembangunan desa mencakup pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa; pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; pelayanan kesehatan desa; pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; pelestarian lingkungan hidup (Hanif, 2011). Sesuai teori tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup pembangunan telah sesuai dengan bidang-bidang tersebut. Berdasarkan focus penelitian yakni tentang pembangunan infrastruktur dapat dipaparkan bahwa ruang lingkungannya yakni betonisasi jalan lingkungan, rabat beton jalan gang, pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah), pembangunan bak sampah, pemasangan paving blok dan pembangunan SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah), dan perbaikan rumah tidak layak huni.

Pada penelitian ini menunjukkan manfaat bagi lingkungan masyarakat Desa Sindanglaya dalam pelaksanaan pembangunan cukup baik karena manfaatnya terasa dapat mempermudah akses masyarakat untuk melakukan kegiatannya. Berikut hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa:

“Eem kalo dulu yah, jalan, jalan juga rusak banget, saya sebelum kesini, sebelum, masih sekolah lah, sekolah SMA, masih berlubang, jadi mengganggu yah ke akses sistem kendaraan kan gitu ya buat kerja, apa pun, buat sekolah. Sekarang mah Alhamdulillah, dari bawah sampe atas, Alhamdulillah kalo desa sindanglaya Alhamdulillah udah pada bagus, jadi membantu banget kalo misalnya dari situ” (Wawancara dengan Ibu Yuni Rahmawati Staff Bendahara di Kantor Desa Sindanglaya, 18 Maret 2020).

Adanya sarana dan prasarana yang baik, akan mempermudah masyarakat dalam mengakses segala kegiatan dan menumbuhkan kenyamanan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Hanif, 2011) hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari pembangunan, yakni untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan (Anggara & Sumantri, 2016).

B. Integrasi

Dimensi Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan organisasi lainnya. Keberhasilan dari berbagai program yang ditujukan kepada masyarakat sangat bergantung pada peran serta masyarakat, karena pelaksanaan kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah lebih kepada promosi, dan di tingkat masyarakat yang dibutuhkan yakni adalah partisipasi. (Silvianis, 2015).

Sebagaimana teori diatas, mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sindanglaya sudah dilakukan, sejak dalam perencanaan yakni melalui musyawarah, dimulai dari tingkat RW, tingkat Dusun, dan tingkat Desa yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan juga melalui website desa Sindanglaya serta grup Whatsapp yang beranggotakan ketua RW. Namun pengaruhnya kepada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih kurang. Berikut hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa:

“Kalo sosialisasi sebetulnya desa mah ga cukup hanya pelaksanaan pembangunan aja, justru dari dasar perencanaan juga desa mah sudah mensosialisasikan. Disosialisasikan perencanaannya, jadi perencanaannya mah disebut di desa itu melalui teknis bottom up, jadi sistem bottom up itu hmm adanya musyawarah tingkat RW, hmm langsung di up lagi ke tingkat dusun, dusun diolah lagi ke tingkat desa, eem baru di desa dibahas bersama itu juga sifatnya sosialisasi juga. Ketika ada putusan kegiatan baru desa mensosialisasikan rencana-rencananya kaya gimana gitu. Nah ketika di sahkan di-Perdes-kan juga disosialisasikan lagi ke masyarakat bahwa kegiatan tersebut akan di laksanakan melalui APBDes, dikatakan apa aja? Anu, anu, gitu, media informasinya juga banyak, media sosialisasinya juga banyak, satu ya melalui musyawarah atau rapat desa, terus melalui media cetak juga bisa, website desa ada, di kabupaten Bandung kebetulan setiap desa punya” (Wawancara dengan Bapak Achmad Kurnia Kepala Urusan Tata Usaha, di Kantor Desa Sindanglaya, 13 Maret 2020).

Keberhasilan dari berbagai program yang ditujukan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat (Silvianis, 2015). Dalam pengembangan konsensus di desa Sindanglaya melibatkan masyarakat yang mewakili suatu kelompok atau golongan, serta tokoh masyarakat. Keterlibatan dalam pemufakatan tersebut dimulai dari rembuk warga tingkat RW, tingkat dusun, dan musyawarah tingkat desa atau Musdes untuk mengajukan program RW masing-masing untuk diputuskan mana yang prioritas. Berikut informasi dari hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa:

“Ya memang masyarakat ikut andil, tapi eem masyarakat yang mewakili, jadi disitu teh dipemerintah desa teh ngadain acara Musdes tuh keterwakilan masyarakat kan gitu, jadi masyarakat yang mewakili kelompok anu, masyarakat yang mewakili kelompok agama gitu, jadi keterwakilan gitu

maksudnya, itu juga keputusannya juga kalo misalnya udah disepakati sama forum, diserahkan juga ke masyarakat diumumkan, berapa hari lah gitu. Kalo misalnya masyarakat udah nerima, mengakses, membaca, gak ada complain, gak ada apa-apa ya tinggal diputuskan peraturan desa-nya gitu.” (Wawancara dengan Bapak Achmad Kurnia Kepala Urusan Tata Usaha, di Kantor Desa Sindanglaya, 13 Maret 2020).

Komunikasi dengan organisasi yang berkaitan dalam APBDes dan pembangunan desa Sindanglaya yakni BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Khusus dalam pengawasan yang berperan paling penting adalah BPD. Sebagaimana teori yang berkaitan bahwa keterpaduan dan kerjasama antar lembaga, pemerintah, dan masyarakat dalam proses penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan, serta pengendalian merupakan salah satu indikator untuk menentukan efektifitas dari keterpaduan perencanaan pembangunan desa (Jamaludin, 2015). Berikut informasi dari hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa:

“Organisasi yang terlibat pembangunan sih, seluruh elemen di pemerintahan desa, malahan mah bisa jadi pelaksana juga, kalo organisasi yang terlibat mah BPD juga terlibat dalam segi pengawasan, dalam segi eee pendampingan, kan gitu, LPMD terlibat dalam segi pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat juga bisa dikerahkan sama LPMD, terus para kasi disini sebagai PPKD ikut juga melaksanakan, para Kepala Seksi dari pemerintahan desa. Lembaga PKK, organisasi PKK, organisasi kepemudaan juga terlibat pembangunan, malahan mah penerima anggaran juga itu jadi termasuk belanja desa juga, semua elemen dilibatkan, tapi yang diprioritaskan dilibatkan organisasi yang ada di desa Sindanglaya.” (Wawancara dengan Bapak Achmad Kurnia Kepala Urusan Tata Usaha, di Kantor Desa Sindanglaya, 13 Maret 2020).

C. Motivasi

Kriteria ini merupakan pengukuran tentang keterkaitan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasi lainnya serta kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasi lainnya dikatakan efektif karena melibatkan seluruh elemen pemerintah dengan BPD, LPMD, PKK, dan Karang Taruna. Sebagaimana teori yang mengatakan bahwa partisipasi semua elemen yang kompeten sangat menentukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. (Silvianis, 2015).

Kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi cukup memadai, dengan tersedianya jaringan telepon, internet, PC, dan lain-lain yang menunjang kinerja dalam pengelolaan APBDes. Sebagaimana teori yang berkaitan bahwa salah satu aspek penting dalam meningkatkan kinerja anggaran desa adalah mengenai pengelolaan keuangan desa dan anggaran desa (Tampomuri, Rorong, & Londa, 2014). Berikut adalah hasil wawancara tersebut:

“Pemerintah Kabupaten sebelum mengimplementasikan aplikasi siskeudes. Pemerintah Desa sudah melakukan pemasangan infrastrukturnya seperti jaringan telepon/internet, PC, dan lain-lain.” (Wawancara dengan Bapak Achmad Kurnia Kepala Urusan Tata Usaha, di Kantor Desa Sindanglaya, 13 Maret 2020).

D. Produksi

Keberhasilan atau tercapai tidaknya sasaran yang diterapkan ditunjukkan melalui efektivitas, strategi pembangunan desa dikembangkan melalui program desa dan juga strategi pembangunan berkelanjutan. (Umbara, Kamaluddin, & Tawai, 2018).

Berdasarkan teori tersebut, dapat dikatakan output dan intensitas APBDes dalam bidang pembangunan kurang efektif, khususnya program pembangunan pada tahun 2018 yang terdapat ketidaksesuaian antara sasaran dan realisasi program. Pada tahun 2018 program kerja pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDes ada ketidaksesuaian, dalam RKPDes termuat 25 program pembangunan, yang terealisasi sebanyak 20 program, namun ada 8 program diluar RKPDes yang dilaksanakan. Namun dalam hasil wawancara memaparkan:

“Sebetulnya mah kalo keseluruhan mah hampir 100% cuma ada penambahan pembangunan jalan lah, kaya waktu 2019 waktu kemarin ada jalan yang sudah dibuat, tapi belum di cor, belum di aspal, baru pemadatan. Bukan belum diperbaiki, tapi baru dibuat, baru dibuat jalannya, baru dibuat, rencananya 2021 -2022 dibeton, dari dulu dari tahun-tahun kemarin jalan itu belum ada. Cuma desa yang bikin, cuma belum dicor, belum di cor. Itu juga hasil peran serta masyarakat, mau ngasih jalan, mau ngasih tanah buat jalan, itu juga termasuk indicator penunjang juga.” (Wawancara dengan Bapak Achmad Kurnia Kepala Urusan Tata Usaha, di Kantor Desa Sindanglaya, 13 Maret 2020).

Pengelolaan penganggaran keuangan dengan baik dapat sangat berpengaruh terhadap penggunaan dana untuk bisa memberikan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan dan penggunaannya, karena dalam proses implementasi selalu memiliki kemungkinan terjadinya perbedaan antara rencana dengan hasilnya, atau dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut memiliki peluang gagal dalam pelaksanaannya (Ngangagor, Posumah, & Sondakh, 1999).

Intensitas khususnya pada infrastruktur jalan masih terdapat jalan yang rusak, berlubang, dan berlumpur yang mengganggu akses masyarakat dan belum diperbaiki hingga saat ini. Intensitas jalan tersebut kurang baik, karena ketahanan jalan beton tersebut kurang dari tiga tahun sudah rusak kembali.

Salah satu yang akan dapat menjadi penentu keberhasilan suatu kegiatan adalah waktu, terutama kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi, begitu pula kegagalan suatu kegiatan organisasi dapat diakibatkan oleh waktu, dengan waktu yang digunakan secara tepat, maka akan menciptakan tingkat efektivitas yang baik dengan mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditentukan, karena waktu yang dilalui tidak dapat terulang kembali maka jangan pernah membuang-buang waktu dan gunakanlah secara tepat (Makmur, 2015).

Faktor yang menghambat efektivitas APBDes dalam pembangunan Desa Sindanglaya adalah faktor yang menunda terlaksananya program pembangunan sehingga selesai tidak tepat pada waktunya. Beberapa faktor diantaranya yaitu karakteristik lingkungan seperti bencana alam, dan faktor cuaca. Faktor lainnya adalah SDM pemerintah desa, yakni kurang profesional dalam pengelolaan APBDes sehingga ada keterlambatan pengajuan dana yang berpengaruh terhadap pencairan dana dan pembangunan ikut tertunda. faktor lainnya datang dari masyarakat, yakni masih ada masyarakat yang belum paham bahwa untuk sampai kepada pelaksanaan

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan Efektivitas APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dalam pembangunan Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dikatakan efektif. Namun ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan yakni dalam dimensi produksi, pada output dan intensitasnya. Hasil analisis hasil dan pembahasan peneliti menemukan beberapa faktor yang menghambat efektivitas APBDes dalam pembangunan Desa Sindanglaya adalah faktor yang menunda terlaksananya program pembangunan sehingga selesai tidak tepat pada waktunya. Beberapa faktor penghambat diantaranya karakteristik lingkungan, Sumber Daya Manusia, dan partisipasi masyarakat.

Referensi

- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Penerbit Erlangga.
- Indrawijaya, A. I. (2009). *Pelaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Argensindo.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Laporan Realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) 2016-2018 Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
- LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) 2016-2018 Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ngangagor, R. P. U., Posumah, J. H., & Sondakh, T. (1999). Pengaruh Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Keberhasilan Pembangunan di Desa Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara, 65(8), 1141–1146.
- Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Silvianis, R. (2015). Efektivitas Organisasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2013. *Jom FISIP*, 2(1), 1–14.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tampomuri, Y., Rorong, A., & Londa, V. (2014). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Betelen Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(004).
- Umbara, D., Kamaluddin, M., & Tawai, A. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Upaya Mewujudkan Efektivitas Program Pembangunan Desa di Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, 1–10.
- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.